

IMPLEMENTASI E-OFFICE DALAM PENINGKATAN PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS DI SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2022

Wahyudin

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email: exelwy88@gmail.com

Abstrak

Hasil survei *e-Government Development Index (EGDI)* tahun 2020 oleh *United Nations* menunjukkan bahwa di Asia Tenggara, Indonesia berada di ranking 7 dan mendapat peringkat 88 di tingkat global. Indonesia harus terus berjuang untuk mengejar ketertinggalan dalam penerapan *e-government* melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya dalam mengimplementasikan SPBE melalui layanan *Government to Government (G2G)*. Melalui kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi dengan sebutan *e-office*. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis serta mengetahui hambatan dan upaya implementasi *e-office* dalam peningkatan pengelolaan tata naskah dinas di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana hasil penelitian dideskripsikan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan teori dari *George C. Edwards III* (Pramono, Joko, 2020:17) meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-office* dalam peningkatan pengelolaan tata naskah dinas di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022 secara umum telah cukup berhasil.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tata Naskah Dinas dan *E-office*

Abstract

According to the United Nations e-Government Development Index (EGDI) survey results for 2020, Indonesia was ranked 7th in Southeast Asia and 88th in the world. Indonesia must continue to work towards closing the gap in e-government implementation through Electronic-Based Governance System (SBPE) policy at the central and regional government levels. The government of DKI Jakarta province has taken steps to implement the Electronic-Based Governance System (SBPE) through Government-to-Government (G2G) services by implementing the Governor of DKI Jakarta regulation number 99 of 2021 concerning Official Administrative Management within the DKI Jakarta Provincial Government. The policy is implemented through an information technology-based application called

e-office. This research aims to identify, analyze, and understand the obstacles and the efforts made to implement the e-office for improving administrative management at the Secretariat OF Central Jakarta City Administration. The research utilized a qualitative-descriptive method, where the results were presented based on the analysis of interview responses, document observations, and studies conducted. The research employed the theory proposed George C. Edwards III (Pramono, Joko, 2020:17), which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure as crucial aspects. The research results indicated that the implementation of the e-office for improving administrative management at the Secretariat of Central Jakarta City Administration in 2022 has generally been successful.

Keywords: Policy Implementation, Administrative Management and E-office

Diserahkan: 10-05-2023; Diterima: 05-06-2023; Diterbitkan: 20-06-2023

PENDAHULUAN

E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat (*tool*) untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Untuk itu Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government* Indonesia. Kemudian kebijakan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perkembangan *e-government* di Indonesia sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dari hasil survei *E-Government Development Index (EGDI)*. Perbandingan perkembangan *e-government* Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara dapat dilihat dalam Tabel 1 Perbandingan *E-Government Development Index (EGDI)* di Tingkat Negara Asia Tenggara.

Tabel 1 Perbandingan E-Government Development Index (EGDI) di Tingkat Negara Asia Tenggara

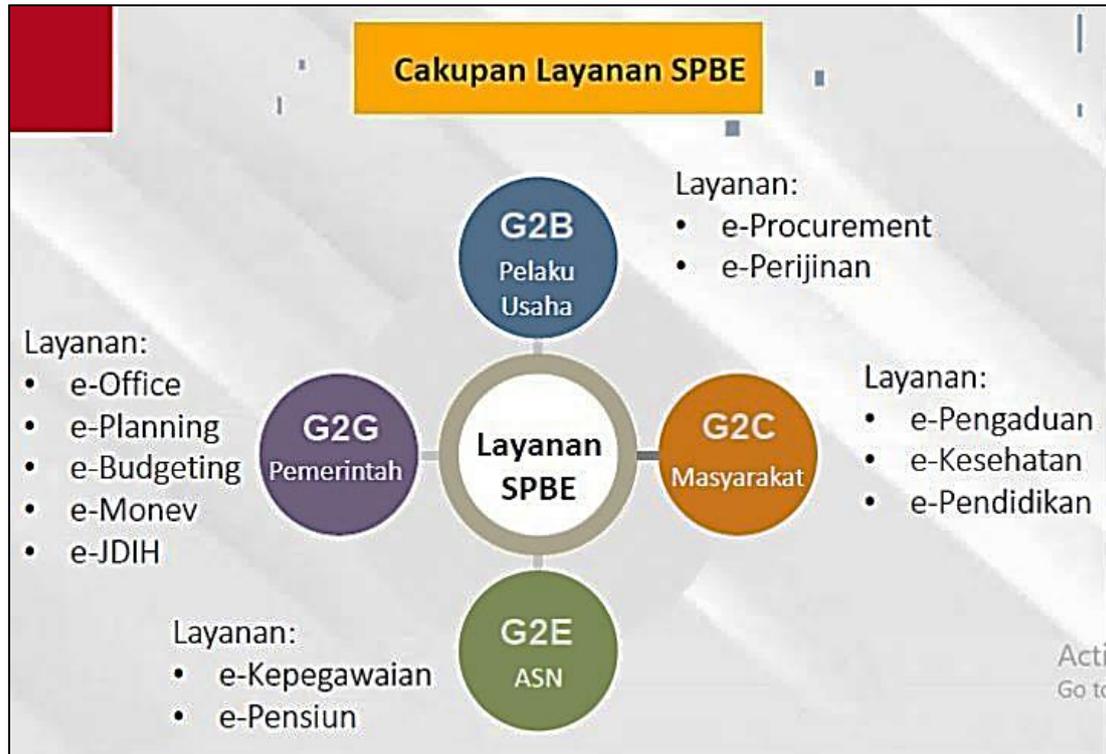
ASEAN Rank	Country Name	E-Government Rank	E-Government Index	E-Participation Index	Online Service Index	Human Capital Index	Tele-communication Infrastructure Index
1	Singapore	11	0.915	0.9762	0.9647	0.8904	0.8899
2	Malaysia	47	0.7892	0.8571	0.8529	0.7513	0.7634
3	Thailand	57	0.7565	0.7738	0.7941	0.7751	0.7004
4	Brunei Darussalam	60	0.7389	0.5476	0.6353	0.7605	0.8209

5	Philippines	77	0.6892	0.75	0.7294	0.7544	0.5838
6	Viet Nam	86	0.6667	0.7024	0.6529	0.6779	0.6694
7	Indonesia	88	0.6612	0.75	0.6824	0.7342	0.5669
8	Cambodia	124	0.5113	0.4167	0.4529	0.5344	0.5466
9	Myanmar	146	0.4316	0.2619	0.2588	0.5125	0.5234
10	Lao People's Democrati c Republic	167	0.3288	0.2143	0.1941	0.5539	0.2383

Sumber : UN E-Government Survey 2020 <https://publicadministration.un.org/>

Dari Tabel 1 diketahui bahwa hasil survei *E-Government Development Index (EGDI)* tahun 2020 yang diselenggarakan oleh *United Nations* menunjukkan bahwa di tingkat negara-negara Asia Tenggara, Indonesia berada di ranking 7 dari 10 negara dan mendapat peringkat 88 di tingkat global. Indonesia masih di bawah negara Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Philipina dan Vietnam. Apalagi jika dilihat dari tingkat global, Indonesia terpaut jauh dari negara Singapura. Dengan demikian bisa dikatakan Indonesia harus terus berjuang untuk mengejar ketertinggalan dalam penerapan *e-government* melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam menerapkan SPBE, pemerintah membentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional yang beranggotakan Menteri Kominfo, Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Kepala BPPT, dan Kepala BSSN. Masing-masing memiliki tugas dan perannya masing-masing. Begitu pula dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah membuat kebijakan berupa Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kebijakan tersebut sesuai dengan amanat pada Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang berbunyi bahwa setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah. Selanjutnya, cakupan layanan SPBE dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Cakupan Layanan SPBE

Sumber : <https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/penerapan-spbe-dan-rencana-pembangunan-pusat-data-nasional/>

Dari Gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa cakupan layanan SPBE terdiri dari:

1. Layanan *G2G* (*Government to Government*), merupakan pelayanan yang berhubungan antar pemerintah berupa *e-office*, *e-Planning*, *e-Budgeting*, *e-Monev*, *e-JDIH*.
2. Layanan *G2B* (*Government to Business Enterprises*), merupakan pelayanan yang berhubungan antar pemerintah dan perusahaan bisnis, berupa *e-Procurement*, *e-Perijinan*.
3. Layanan *G2C* (*Government to Citizens*), merupakan pelayanan yang berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat, berupa *e-Pengaduan*, *e-Kesehatan*, *e-Pendidikan*.
4. Layanan *G2E* (*Government-to-Employee*), merupakan pelayanan yang berhubungan dengan pemerintah dan aparatnya, berupa *e-Kepegawaian* dan *e-Pensiun*.

Seiring dengan kebijakan SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya dalam mengimplementasikan SPBE melalui layanan *Government to Government* (*G2G*). Layanan *G2G* tersebut ditetapkan melalui sebuah kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setiap Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta diamanatkan untuk mengimplementasikan Tata Naskah Dinas Elektronik. Hal tersebut ditegaskan dalam BAB XVI Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik. Tata Naskah Dinas

Elektronik yang disingkat (NDE) diimplementasikan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi dengan sebutan *e-office*.

Aplikasi *e-office* ini merupakan aplikasi tata naskah dinas elektronik yang di dalamnya terdapat pengelolaan surat masuk dan surat keluar di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. *E-office* ini dibuat untuk mempermudah dan mempercepat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini perlu dukungan semua pihak agar kebijakan yang sudah ditetapkan dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Pelaksanaan *e-office* di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat terus diupayakan dalam rangka mendukung pelaksanaan SPBE. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dikutip dari menpan.go.id bahwa berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 1503/2021 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 peraih predikat sangat baik pada evaluasi SPBE 2021 kategori pemerintahan daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada di bawahnya, yaitu hanya menduduki peringkat Baik dengan nilai indeks SPBE 3,47.

Implementasi *e-office* di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah dimulai pada tahun 2019. Namun saat itu masih terdapat kendala karena adanya permasalahan pembatasan pemanfaatan *e-office* yang hanya sampai diterapkan kepada jajaran eselon II saja di seluruh OPD. Berikut data penerapan *e-office* di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Table 2.

Tabel 2 Implementasi *e-office* tahun 2019 – 2022

Tahun	Penerapan <i>e-office</i>			
	Esselon I	Esselon II	Esselon III	Esselon IV
2019	✓	✓	-	-
2020	✓	✓	-	-
2021	✓	✓	-	-
2022	✓	✓	✓	✓

Sumber : Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat (diolah)

Dari tabel 2 Implementasi *e-office* tahun 2019-2022 dapat dilihat penerapan *e-office* yang diimplementasikan di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat mulai tahun 2019. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 implementasi *e-office* hanya sampai dengan tingkat eselon II. Selanjutnya tahun 2022 baru diimplementasikan sampai dengan tingkat eselon IV bahkan sudah sampai menyentuh tingkat pelaksana/staf di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan, hambatan dan upaya dalam implementasi *e-office* dalam peningkatan pengelolaan tata naskah dinas di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2022 ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan karena penulis bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi *e-office* dalam peningkatan pengelolaan tata naskah dinas di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2022. Untuk itu diperlukan berbagai informasi dan data-data empiris yang relevan mengenai gejala-gejala (fenomena) dalam menguraikan, menggambarkan, menganalisa, dan menginterpretasikan hasil dari penelitian tentang kondisi sebenarnya mengenai implementasi *e-office*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan berikut ini peneliti akan menganalisa dan mengidentifikasi berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen mengenai implementasi *e-office* dalam peningkatan pengelolaan tata naskah dinas di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2022. Pembahasan penulisan sajikan dengan berpedoman pada kerangka teori yang sudah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Aspek Komunikasi

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-office* dalam mendukung *e-government* di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2022 ditinjau dari aspek komunikasi secara umum sudah berjalan dengan baik. Komunikasi dibangun melalui sosialisasi, serta pendampingan secara langsung yang dilakukan melalui berbagai cara baik secara luring maupun daring dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial *WhatsApp*, *WA Grup*, *Zoom Meeting* dan *e-mail*. Hambatan yang terjadi berdasarkan hasil penelitian Ramawati *et al* (2016) memiliki persamaan yaitu permasalahan adanya jaringan dan *server* sering rentan terhadap gangguan. Adapun perbedaannya yaitu tidak diungkapkan permasalahan hambatan pada saat awal implementasi yaitu adanya masalah keseragaman penyerapan pemahaman. Upaya dalam aspek komunikasi yang sudah dilakukan yaitu dengan aktif berkomunikasi dan berkoordinasi antar stakeholder terkait dalam mendukung implementasi kebijakan ini.

2. Aspek Sumber Daya

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-office* dalam mendukung *e-government* di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat ditinjau dari aspek sumber daya manusia (SDM), senada dengan teori yang disampaikan George C. Edward III bahwa sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, demikian juga dalam implementasi *e-office* di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, sumber daya yang

utama adalah sumber daya manusia (SDM) yang meliputi ASN dan Non ASN. Selanjutnya terkait hambatan dalam implementasi kebijakan ini karena adanya gangguan pada *system e-office* itu sendiri hal tersebut dapat terjadi karena adanya gangguan jaringan *internet* ataupun sistemnya *down*. Permasalahan yang ditemukan pada dimensi sumber daya manusia (SDM), di mana kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang masih beragam, belum siap sepenuhnya. Selanjutnya upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan ini ditinjau dari aspek sumber daya yaitu dengan terus melakukan peningkatan sumber daya baik SDM ataupun sarana prasarana pendukung lainnya. Upaya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, membuka klinik konsultasi *e-office* serta pendampingan langsung dengan menghadirkan instruktur dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta ataupun dengan personal Bagian Umum dan Protokol yang kompeten. Seperti yang penulis temukan pada saat observasi lapangan, penulis melihat unit kerja Bagian Keuangan yang sedang melakukan koordinasi pendampingan langsung dalam penyelesaian tata naskah dinas melalui *e-office*. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya dilihat dari aspek sumber daya yang sudah dilakukan yaitu dengan peningkatan kompetensi SDM melalui sosialisasi ataupun bimtek. Melakukan penguatan sumber daya pendukung seperti penguatan jaringan dan koneksi internet serta penguatan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder terkait.

3. Aspek Disposisi

Dilihat dari aspek disposisi, secara umum implementasi *e-office* mendapat tanggapan positif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal tersebut karena *e-office* dinilai efektif dan efisien. Hambatan yang terjadi yaitu adanya kekhawatiran pada saat awal implementasi. Saat ini masalahnya kurangnya respon terhadap *notifikasi e-office*. Aplikasi yang *diinstall* di handphone hanya sebatas mengetahui notifikasi, belum bisa melakukan respon terhadap data yang berjalan dalam sistem *e-office*. Upaya yang dilakukan dilihat dari aspek disposisi yaitu dengan melakukan penguatan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait, membangun komitmen bersama serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

4. Aspek Struktur Birokrasi

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari Aspek Struktur Birokrasi pada implementasi *e-office* dalam peningkatan pengelolaan tata naskah dinas di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2022, telah didukung adanya struktur organisasi yang terdapat dalam *e-office* yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kendala yang ada ditinjau dari aspek struktur birokrasi yaitu pada saat awal implementasi terjadi *double job/tumpang tindih* karena adanya tupoksi yang saling beririsan, perhatian beberapa SDM di tingkat pimpinan unit masih kurang, masih mengandalkan staf/bawahan dalam pengoperasian *e-office*. Belum adanya pemberlakuan

perjanjian kinerja implementasi *e-office* pada setiap jajaran dan belum adanya SOP menjadi penghambat dalam implementasi *e-office* ini.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek struktur birokrasi, upaya yang dilakukan yaitu melakukan monev secara menyeluruh, rutin dan berkelanjutan. Kemudian melakukan penguatan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi *e-office* dalam peningkatan pengelolaan tata naskah dinas di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2022 menunjukkan bahwa implementasi *e-office* dalam peningkatan pengelolaan tata naskah dinas di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022 secara umum telah cukup berhasil.

BIBLIOGRAFI

- Abdoellah *et al.* 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Al-Hakim, Latif. 2007. *Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking*. United States of America: Idea Group Publishing.
- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Antoni *et al.* 2021. *E-government berbasis information technology infrastructure : governance, trust, transparency, e-government RT/RW and agriculture e-government*. Jakarta: CV. Mitra Mandiri Persada.
- Baba, Mastang Ambo. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar Sulawesi Selatan : Penerbit Aksara Timur.
- Hardani *et al.* 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Haryoko, Sapto *et al.* 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Karyaningsih, P. D. 2018. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Kusumastuti & Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kota Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lestari, Puji *et al.* 2012. *Komunikasi Militer*. Jakarta: ASPIKOM.
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhokseumawe : Unimal Press.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Pasolong, Harbani. 2020. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Patton *et al.* 2016. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning Third Edition*. New York: Routledge.
- Pradono, Julianty, *et al.* 2018. *Panduan Penulisan Naskah Ilmiah*. Jakarta : Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Kota Surakarta: UNISRI Press.
- Setyosari, Punaji. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan Edisi ke Empat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sidiq *et al.* 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo : Nata Karya.
- Sugiyono dan Lestari, Puji. 2021. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Afabet.
- 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahza, Almasdi. 2021. *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)*. Pekanbaru: UR Press.

- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2020. *E-Government Survey 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development With addendum on COVID-19 Response*. New York: United Nations.
- Widjajanto, A., & Wardhani, A. 2008. *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*. Jakarta : PACIVIS.
- Agustina *et al.* 2019. *Analisis Implementasi Tata Naskah Dinas dalam Pembuatan Surat Dinas*. Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan, 2019, Vol 12(2) di Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM)
- Anta, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. 2022. *Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 3(2), 236-248.
- Aziz, S. A. 2016. *Implementasi Kebijakan Pengembangan E-Government*. Jurnal Kebijakan Publik. Volume 7, Nomor 1. hlm. 1-98
- Herdiana, F. dan Marsofiyati. 2019. *Penerapan dan Pemanfaatan E – Office Sebagai Perwujudan Paperless Office*. JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran), 3(1), 68-74.
- Lestari, Y. D. *et al.* 2019. *Pengembangan E-Government melalui Layanan Aspirasi Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang*. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 16(2), 163-178.
- Putra, R. H., & Khaidir, A. 2019. *Concept of George C. Edwards III on implementation of regional regulations No. 12 of 2017 concerning youth in granting youth service in West Sumatera*. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), 15(1), 236-242.
- Rahadian, A. H. 2019. *Revitalisasi Birokrasi Melalui Transformasi Birokrasi Menuju E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0*. In Prosiding Seminar STIAMI (Vol. 6, No. 1, pp. 85-94).
- Rahadian, A. H. *et al.* 2019. *Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok*. Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 6(1), 68-75.
- Ramawati *et al.* 2016. *Penerapan E-Office Dalam Rangka Mewujudkan E-Government (Studi Kasus: Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali)*. Citizen Charter, 1(1), 165162.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, Vol. 11 No.01, 1-12.
- Siregar, S. M., & Isnaini, I. 2015. *Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (Add) Tahun 2014 Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir*. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), Vol.6 No.2, 197-217.

- Zuhdi *et al.* 2020. *Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Surat di Kantor Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No.2, Agustus 2020, Hal 246 – 255
- Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government* Indonesia
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi
- Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

First publication right:

Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia

This article is licensed under:

